

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Maret 2023/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
UNIT KERJA : DINAS KESEHATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SYAHRIZAL ANTONI SY
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 245137

II. DATA HARTA

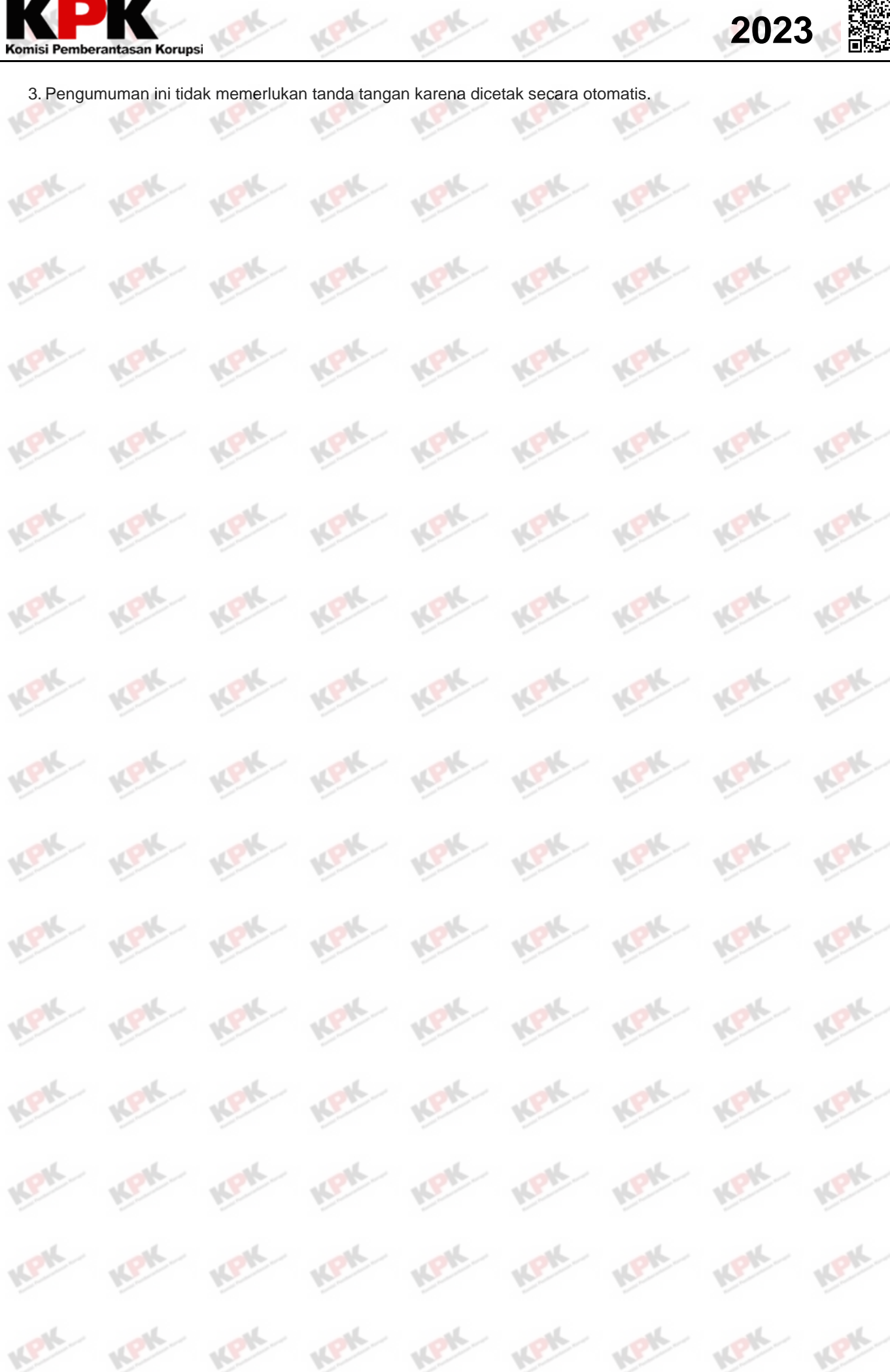
A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	900.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANG , HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	103.000.000
1. MOTOR, YAMAHA MIO Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000		
2. MOBIL, TOYOTA AGYA Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	346.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	455.292.616
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	1.804.292.616
III. HUTANG	Rp.	60.044.998
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.744.247.618

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.



3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.





PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
UNIT KERJA : DINAS KESEHATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **INTAN NOVIA FATMA NANDA**
2. Jabatan : **SEKRETARIS**
3. NHK : **774763**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. **695.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 210 m2/90 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANG , HASIL SENDIRI , HADIAH , Rp. 600.000.000
2. Tanah Seluas 720 m2 di KAB / KOTA PESISIR SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 95.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **200.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA YARIS Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
2. MOBIL, TOYOTA SIENTA Tahun 2018, HASIL SENDIRI , LAINNYA , Rp. 140.000.000
3. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2018, HASIL SENDIRI , LAINNYA , Rp. 10.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **100.000**

D. SURAT BERHARGA Rp. **---**

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. **6.000.000**

F. HARTA LAINNYA Rp. **---**

Sub Total Rp. **901.100.000**

III. HUTANG Rp. **585.000.000**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. **316.100.000**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
UNIT KERJA : DINAS KESEHATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : FITRIA
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 863357

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	689.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 15 m ² /21.5 m ² di PESISIR SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 189.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 12 m ² /10 m ² di PESISIR SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	80.000.000
1. MOBIL, NISSAN GRAND LIVINA XVMT Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	---
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	2.500.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	771.500.000
III. HUTANG	Rp.	302.100.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	469.400.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
UNIT KERJA : DINAS KESEHATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ERNA JUITA
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 863121

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 3.183.100.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 2 m2/84 m2 di KAB / KOTA PESISIR SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 7.520 m2/7.520 m2 di KAB / KOTA PESISIR SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 500 m2/500 m2 di KAB / KOTA MUARO JAMBI, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 759 m2/759 m2 di KAB / KOTA KOTA JAMBI , HASIL SENDIRI Rp. 683.100.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 334 m2/334 m2 di KAB / KOTA SUMEDANG, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 163.000.000

1. MOBIL, TOYOTA KIJANG INOVA V AT Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 135.000.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR PCX Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 28.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ---**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 19.000.000**F. HARTA LAINNYA** Rp. 40.000.000

Sub Total Rp. 3.405.100.000

III. HUTANG Rp. ---**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 3.405.100.000



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
UNIT KERJA : DINAS KESEHATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : Zaidina Umar
2. Jabatan : Kepala Bidang
3. NHK : 844674

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 1.970.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 162 m²/100 m² di KAB / KOTA KOTA PADANG , HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 417 m²/350 m² di KAB / KOTA PESISIR SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 950.000.000
3. Tanah Seluas 7.920 m² di KAB / KOTA PESISIR SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
4. Tanah Seluas 2.361 m² di KAB / KOTA PESISIR SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
5. Tanah Seluas 5.897 m² di KAB / KOTA PESISIR SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 709.000.000

1. MOBIL, TOYOTA RUSH 1.5 S M/T / MINIBUS Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
2. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO SPORT / JEEP Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
3. MOTOR, HONDA NC11BIC AST / SOLO Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
4. MOTOR, HONDA KIRANA Tahun 2003, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 50.000.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 341.469.064



F. HARTA LAINNYA	Rp.	350.000.000
Sub Total	Rp.	3.420.469.064
III. HUTANG	Rp.	---
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.420.469.064

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.